

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu variabel penting untuk kemajuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu negara. Pendidikan memiliki prioritas yang sangat penting untuk ditingkatkan bagi pembangunan negara maju maupun negara berkembang. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh negara maju maupun negara berkembang tidak akan bisa berkembang jika tidak ditangani oleh ahli yang tepat dengan pengetahuan dan teknologi yang memadai. Hal ini sependapat dengan konsep yang di publikasikan oleh *United Nasion Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 yaitu *Human Development Indeks (HDI)*.

Disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran. Serta, ditetapkan jaminan akses untuk memperoleh pendidikan yang bermutu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Serta warga negara yang memiliki kelainan fisik maupun nonfisik seperti kelainan Emosional, Mental, Intelektual, dan Sosial tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu secara khusus tanpa diskriminasi. Maka berdasarkan Undang-Undang diatas pemerintah wajib memberikan pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi yang berkualitas. Upaya

pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan usaha yang tidak ada hentinya hal ini agar masyarakat Indonesia bisa bersaing di era globalisasi.

Indikator penting untuk mengukur keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya adalah dengan Indeks Pendidikan. Pembangunan Nasional yang telah di rencanakan akan tercapai dengan mudah jika tingkat pendidikan yang sudah memadai untuk seluruh penduduk. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi maka bisa dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran serta rendahnya pertumbuhan ekonomi negara. Serta diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Keberlangsungan proses pendidikan akan melibatkan lingkungan, baik melibatkan lingkungan sosial budaya maupun nilai-nilai keagamaan. Lingkungan sosial dan budaya akan sangat berpengaruh ketika tempat tinggal, pergaulan, sarana dan prasarana serta budaya yang ada di lingkungan tersebut tidak mendukung keberlangsungan penduduk untuk terus berada pada proses pendidikan. Selanjutnya, lingkungan keagamaan merupakan proses manusia dalam melaksanakan kewajibannya dengan di dukung nilai-nilai keagamaan. Kemampuan seseorang untuk berfikir bahwa pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan diri juga dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim yang ada di lingkungan daerah tersebut.

Ketika lingkungan baik sosial, budaya dan keagamaan sudah mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan sudah ditangani oleh tenaga pendidik yang

professional hal ini akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintelektual dan pendidikan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa masih banyaknya daerah terpencil yang belum terjangkau sarana dan prasarana yang memumpuni untuk keberlangsungan proses pendidikan yang baik. Pendidikan terendah akan dimiliki oleh masyarakat dengan kondisi yang memiliki pendapatan 20% terbawah atau masyarakat yang termasuk pada kategori Kuintil I.

Keadaan pendidikan di Indonesia sekarang masih terbilang jauh dari kata ideal namun terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan untuk semua masyarakat bisa memenuhi haknya untuk mendapat pengajaran kendala seperti biaya pendidikan, akses pendidikan dan fasilitas sangat menghambat masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang sulit di jangkau di daerah-daerah terpencil menjadi salah satu permasalahan yang di alami oleh Indonesia Kondisi ini bisa dilihat dari sedikitnya masyarakat yang bisa menyelesaikan pendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar. Demi memperbaiki kualitas masyarakat pemerintah akan terus mengupayakan salah satu bidang penting yaitu bidang pendidikan (Rahmatin & Soejoto, 2017).

Menurut Septiana (2008), kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sebuah negara bisa di dorong dengan kontribusi pendidikan yang baik. Untuk melihat kualitas pendidikan yang baik bisa dilihat dengan besarnya Angka Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi beberapa kriteria usia, yaitu :

1. Usia 6-12 tahun memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.

2. Usia 13-15 tahun memasuki jenjang pendidikan menengah pertama.
3. Usia 16-18 tahun memasuki jenjang pendidikan menengah atas.
4. Usia 19-24 tahun memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Untuk mengukur Angka Partisipasi Sekolah bisa dilihat dengan 2 indikator, yaitu berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan untuk mengukur rasio anak atau penduduk pada suatu kelompok tertentu yang masih menempuh jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan untuk mengukur rasio anak atau penduduk pada suatu kelompok usia tertentu yang sedang menempuh di tingkat jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling mudah untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing tingkat jenjang pendidikan (BPS, 2017). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) bisa dilihat berdasarkan ketepatan usia anak atau penduduk dalam berpartisipasi pada jenjang pendidikan.

Di antara faktor penyebab rendahnya APK pendidikan tinggi di Indonesia adalah faktor tidak meratanya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak meratanya kualitas pendidikan tinggi dapat dilihat dari data perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah terakreditasi dengan nilai A. Tercatat ada 27 PTS dibawah binaan Kemenristekdikti sudah mendapatkan nilai akreditasi A, akan tetapi PTS yang terakreditasi A masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Faktor lain penyebab rendahnya APK pendidikan tinggi di Indonesia yaitu perguruan tinggi yang berbasis vokasi lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi berbasis akademik. Industrialisasi menuntut masyarakat untuk memiliki keterampilan dalam pekerjaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergerak di seluruh lini untuk mewujudkan generasi emas. Berbagai program pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Di antara jenjang pendidikan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih berada di bawah APK jenjang pendidikan lainnya. Tahun 2004, APK perguruan tinggi di Indonesia masih berada di level 14 persen. APK perguruan tinggi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2012, APK perguruan tinggi meningkat dua kali lipat menjadi 28 persen dari APK di 2004. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan tinggi Indonesia tahun 2021 mencapai 31.19 persen dengan skema peningkatan akses secara konvensional, rata-rata peningkatan APK hanya 0.5 persen per tahun. Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 Kemendikbud menargetkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi mencapai 35 persen.

Jumlah perguruan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Pulau Papua masih terbilang terbatas. Oleh karena itu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu tepat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah tersebut. Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang di aplikasikan pada wilayah Pulau Papua akan meningkatkan APK lebih signifikan. Namun sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan proses pembelajaran daring sangat membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan

internet yang baik agar wilayah Pulau Papua ini tidak tertinggaljau dari perguruan tinggi di Pulau Jawa.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saat ini sedang mengembangkan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia yang disingkat SPADA atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sistem seperti ini dikembangkan tidak lain adalah untuk pemerataan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Daerah terluarpun seperti Pulau Papua, Kalimantan atau Sulawesi dapat merasakan layanan pendidikan tinggi yang setara dengan pendidikan tinggi yang berada di pulau Jawa. Oleh sebab itu SPADA dibuat untuk meretas kesenjangan pendidikan tinggi didaerah di luar pulau Jawa, sehingga minat masyarakat untuk kuliah diperguruan tinggi semakin meningkat, karena di daerahpun memiliki kualitas yang sama dengan perguruan tinggi yang ada diperkotaan.

Indikator keberhasilan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam Inpres 2014 yaitu Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan melihat tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) disemua jenjang Pendidikan. Salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan gambaran umum suatu wilayah yang dapat digunakan acuan *background* untuk perencanaan dan penganggaran untuk sektor pendidikan dapat menggunakan besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Dalam penelitian ini di fokuskan untuk meneliti Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi karena besarnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi dapat merepresentasikan kualitas layanan dari pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Besarnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga dapat menilai bagaimana masyarakat memperoleh kemudahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan setinggi-tingginya. Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional sebesar 31,19% (BPS, 2021). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih dibawah dari yang telah di targetkan oleh Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terjadinya pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia berdampak pada pengurangan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sebanyak 20-30%. Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memegang kapasitas penting dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta dapat melahirkan penerus bangsa dengan pola pikir yang lebih kreatif dan inovatif untuk pembangunan bangsa di masa depan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang di tunjukan oleh Tabel 1.1 membuktikan bahwa setiap tahunnya untuk Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan Perguruan Tinggi jika di bandingkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera setiap tahunnya Pulau Jawa mengalami kenaikan yang cukup tinggi jika dibandingkan Pulau Sumatera. Dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi khususnya pada Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya baik di Pulau Jawa

maupun di Pulau Sumatera, DI Yogyakarta sangat dikenal dengan Provinsi yang memiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang sangat banyak dan berkualitas.

**Tabel 1.1**

**Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera  
Tahun 2016-2018**

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar PT Berdasarkan Provinsi (Persen)		
	2016	2017	2018
DKI JAKARTA	33.58	34.94	36.71
JAWA BARAT	24.59	25.05	25.14
JAWA TENGAH	19.69	21.88	21.96
DI YOGYAKARTA	65.51	70.01	70.06
JAWA TIMUR	28.13	30.23	29.99
BANTEN	29.02	31.04	33.04
ACEH	42.06	45.73	43.86
SUMATERA UTARA	28.93	30.71	31.11
SUMATERA BARAT	40.54	43.53	44.19
RIAU	29.81	33.37	34.15
JAMBI	26.98	32.27	33.78
SUMATERA SELATAN	21.64	23.77	26.23
BENGGULU	41.00	41.52	38.31
LAMPUNG	16.05	18.84	21.32
KEP. BANGKA BELITUNG	14.48	15.01	13.20
KEP. RIAU	22.11	23.08	27.64

*Sumber : BPS Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Menurut Provinsi 2016-2018*

Berdasarkan tabel 1.1 angka partisipasi kasar perguruan tinggi pulau jawa dan pulau sumatera selama 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Dalam 3 tahun terakhir angka partisipasi kasar perguruan tinggi tertinggi berada pada Provinsi DI Yogyakarta

yaitu sebesar 70.6%. Sedangkan, angka partisipasi kasar perguruan tinggi terendah selama 3 tahun terakhir berada pada Provinsi Lampung yaitu sebesar 13.20%.

Perguruan tinggi merupakan penunjang keberlangsungan program pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Banyaknya jumlah perguruan tinggi sebagai wadah untuk menampung peserta didik. Saat ini, Indonesia memiliki perguruan tinggi sebanyak 4.593, dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan sebanyak 0,01% hal ini dikarenakan kendala di peningkatan kualitas perguruan tinggi. Pemerintah terus *mengupgarde* kualitas perguruan tinggi dengan ide-ide yang inovatif melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini mengimplementasikan 8 kegiatan dalam bentuk pembelajaran yaitu: Pertukaran Pelajar, Magang, Asisten mengajar, Penelitian, Kuliah kerja nyata, Proyek independen, proyek kemanusiaan dan terakhir Kegiatan wirausaha. Program yang dikeluarkan pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PTN). Di dalam peraturan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi atau yang disebut IKU PTN terdapat 8 indikator utama yaitu : Lulusan dapat pekerjaan yang layak, Mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktik mengajar di dalam kampus, Hasil Kerja dosen dapat digunakan masyarakat, Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, Memiliki kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan Program studi berstandar internasional.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Perguruan Tinggi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera**  
**Berdasarkan Tahun Ajaran 2016-2019 (Persen)**

Provinsi	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
	(Unit)			(Unit)			(Unit)		
DKI Jakarta	5	318	<b>323</b>	5	315	<b>320</b>	4	291	<b>295</b>
Jawa Barat	12	380	<b>392</b>	12	385	<b>397</b>	12	389	<b>401</b>
Banten	1	118	<b>119</b>	1	121	<b>122</b>	2	117	<b>119</b>
Jawa Tengah	9	256	<b>265</b>	9	271	<b>280</b>	9	263	<b>272</b>
DI Yogyakarta	4	108	<b>112</b>	4	106	<b>110</b>	4	106	<b>110</b>
Jawa Timur	17	328	<b>345</b>	17	320	<b>337</b>	17	337	<b>354</b>
Aceh	7	108	<b>115</b>	7	111	<b>118</b>	7	102	<b>109</b>
Sumatera Utara	3	267	<b>270</b>	3	273	<b>276</b>	3	240	<b>243</b>
Sumatera Barat	5	102	<b>107</b>	5	100	<b>105</b>	5	100	<b>105</b>
Riau	2	77	<b>79</b>	2	78	<b>80</b>	2	79	<b>81</b>
Jambi	1	39	<b>40</b>	1	40	<b>41</b>	1	38	<b>39</b>
Sumatera Selatan	2	104	<b>106</b>	2	104	<b>106</b>	2	106	<b>108</b>
Bengkulu	1	18	<b>19</b>	2	16	<b>18</b>	2	17	<b>19</b>
lampung	3	77	<b>80</b>	3	81	<b>84</b>	3	82	<b>85</b>
Kep Bangka Belitung	2	16	<b>18</b>	2	16	<b>18</b>	2	16	<b>18</b>
Kepulauan Riau	2	31	<b>33</b>	2	31	<b>33</b>	2	34	<b>36</b>

*Sumber : BPS Jumlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Tahun Ajaran 2016-2019*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa semua provinsi memiliki jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang konstan dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan jumlah Perguruan Tinggi Negeri yaitu sebesar 1 unit Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini berbeda dengan Perguruan Tinggi Swasta selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif dan cenderung menurun di setiap tahunnya, penurunan tertinggi selama 3 tahun terakhir

berada pada Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan Jumlah Perguruan Tinggi Swasta yaitu sebanyak 33 unit. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 28 unit.

Upaya pemerintah untuk peningkatan Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi salah satunya dengan merencanakan diberdirikannya perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta di daerah-daerah terpencil sebagaimana tujuan pemerintah untuk pemerataan pendidikan dan memberikan subsidi kepada masyarakat ekonomi lemah melalui beberapa program seperti beasiswa Bidikmisi, KIP-Kuliah dan subsidi UKT.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) kemiskinan adalah keadaan dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan dan pendidikan. Ketika keadaan ekonomi suatu keluarga pada tingkat ekonomi dengan output yang besar atau cukup maka anak dari keluarga tersebut akan terus dalam proses pendidikan dan sebaliknya apabila aoutpun dari keluarga tersebut dikatakan tidak begitu cukup maka anak tersebut tidak dapat terus melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) sebanyak 25,91 juta penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan dikarenakan pendapatan yang masih dibawah rata-rata yaitu sebsesar Rp. 1.990.170 per rumah tangga per bulan (Statistik, 2018). Namun disamping itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 9,4% pada tahun 2019. Tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam periode tertentu dikarenakan adanya kontribusi besar dari indeks pendidikan yang mengakibatkan menurunnya angka kemiskinan.

Menurut Dueramae (2017) rendahnya tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingginya kemiskinan pada masyarakat, terutama angka partisipasi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kondisi biaya perguruan tinggi yang mahal serta fasilitas pendidikan yang terbatas membuat masyarakat miskin sulit mengakses pendidikan tinggi. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik mempublikasikan adanya kenaikan rata-rata uang pangkal Indonesia sebesar 10-15% per tahunnya. Ketika biaya yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan mengalami kenaikan hal ini akan berpengaruh kepada biaya yang akan dikeluarkan untuk dapat bersekolah. Dampaknya menyebabkan kemiskinan semakin meningkat dan angka partisipasi sekolah semakin rendah serta tingkat pengangguran bertambah dikarenakan masyarakat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang lebih mengandalkan ketrampilan individu di berbagai bidang. Latar belakang ekonomi dari masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lanjut atau tidaknya anak dalam melanjutkan pendidikan.

PDRB perkapita merupakan refleksi dari rata-rata pendapatan per tahun per kepala keluarga pada masyarakat di suatu wilayah tertentu. PDRB perkapita diduga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan naik dan turunnya Angka Partisipasi Pendidikan di daerah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini difokuskan menggunakan PDRB perkapita menurut harga yang berlaku dikarenakan dapat menggambarkan pendapatan masyarakat dengan nilai tambah dari barang dan jasa yang di hitung dengan harga pada setiap tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020 PDRB perkapita Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,7% atau sebesar Rp. 56,9 juta dari tahun

2019 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Provinsi Indonesia. Pendapatan per kapita yang rendah akan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi sekolah tingkat perguruan tinggi, karena perguruan tinggi akan menghabiskan banyak biaya.

**Tabel 1.3**

**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Berdasarkan Provinsi  
Tahun 2017-2019 (Rupiah)**

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Ribu Rupiah)		
	2017	2018	2019
Dki Jakarta	228002.70	247678.50	266794.00
Jawa Barat	37223.11	40272.64	43069.45
Jawa Tengah	34234.31	36770.96	39217.68
Di Yogyakarta	31664.92	34136.93	36708.48
Jawa Timur	51228.45	55410.61	59089.96
Banten	45275.58	48370.15	51182.45
Aceh	28096.71	29521.25	30562.54
Sumatera Utara	48003.60	51427.49	54908.58
Sumatera Barat	40194.29	42802.66	45207.45
Riau	105844.80	110384.90	109092.90
Jambi	53993.40	58224.89	59885.54
Sumatera Selatan	46315.05	50104.67	53554.10
Bengkulu	31359.48	33822.13	36202.48
Lampung	36998.32	39716.46	42228.59
Kep. Bangka Belitung	48827.25	50081.95	50911.43
Kep. Riau	109332.90	116461.40	122237.70

*Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Tahun 2017-2019*

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Provinsi DKI Jakarta pada 3 tahun terakhir berada pada posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada yaitu sebesar Rp. 266.794.00. Semua Provinsi baik itu Pulau

Jawa maupun Pulau Sumatera selama 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya terkecuali PDRB perkapita pada tahun 2020 semua Provinsi mengalami penurunan di akibatkan karena adanya pandemi Covid-19. Penurunan yang terjadi pada PDRB perkapita di setiap Provinsi secara tidak langsung akan mengakibatkan berkurangnya masyarakat untuk berpartisipasi melanjutkan jenjang pendidikan terutama pendidikan tinggi. Sehingga Angka Partisipasi Kasar pada Perguruan Tinggi akan mengalami penurunan.

Meningkatkan angka partisipasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi selain menekan jumlah penduduk miskin pemerintah juga berupaya meningkatkan melalui anggaran pendidikan. salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi perguruan tinggi adalah anggaran pendidikan. pemerintah terus berupaya menaikkan anggaran pendidikan di setiap tahunnya.

Anggarana pendidikan sebesar 20% dari keseluruhan APBN merupakan wujud usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan negara. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan upaya investas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas masyarakat.

Dalam memenuhi pelayanan publik khususnya bidang pendidikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja pendidikan yang digunakan untuk gaji pendidik dan biaya pendidik. Namun, penetapan dana pendidikan masih belum seimbang karena Pendapatan Asli Daerah setiap Provinsi yang berbeda-beda.

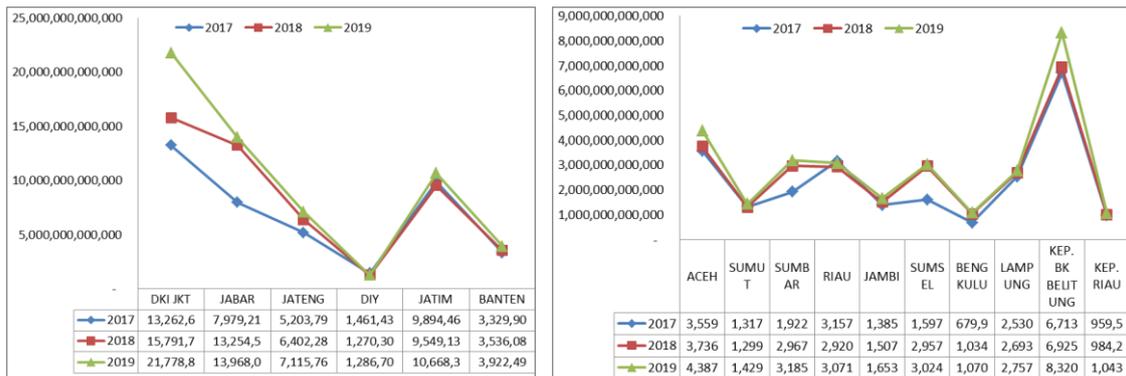
Permasalahan pendidikan di daerah tidak luput dari sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah dan kualitas dari tenaga pengajar yang tidak tersebar dengan merata sehingga proses pembelajaran yang baik tidak dapat terealisasi dengan baik. Permasalahan diatas salah satunya diakibatkan karena pengelolaan APBD sektor pendidikan yang belum sepenuhnya berkontribusi pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Maka dengan penjelasan di atas sangat diperlukan adanya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang besar untuk setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan terutama dalam meningkatkan partisipasi pada jenjang perguruan tinggi. Kendala yang di alami pemerintah dalam pengalokasin anggaran bidang pendidikan cukup terbilang kompleks karena pemerintah setiap tahunnya sudah berupaya terus menaikkan anggaran bidang pendidikan

Ketidaktahuan pemerintah pusat dalam sistem pengalokasian anggaran bidang pendidikan pada pemerintah daerah berjalan baik atau tidak merupakan kendala kompleks, yang membuat pemerintah pusat dilema dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Karena, meningkatnya anggaran pendidikan belum mampu memperbaiki partisipasi sekolah terutama dalam pendidikan tinggi.

**Gambar 1.1**

**Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Berdasarkan Provinsi  
Tahun 2017-2019 (Rupiah)**



Sumber : DJPK Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 2017-2019

Berdasarkan grafik 1.2 di atas terdapat 5 provinsi dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tertinggi yaitu pada posisi pertama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dengan pengeluaran bidang pendidikan sebesar Rp. 21.778.832.245. Selanjutnya di posisi kedua yaitu Jawa Barat dengan pengeluaran bidang pendidikan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 13.968.049.089.155. Kemudian di posisi ketiga yaitu Jawa Timur dengan pengeluaran bidang pendidikan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10.668.364.475.385. Lalu, di posisi keempat yaitu Kepulauan Bangka Belitung dengan pengeluaran bidang pendidikan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 8.320.449.504.766. Selanjutnya Provinsi dengan pengeluaran bidang pendidikan tertinggi terakhir yaitu Jawa Tengah dengan pengeluaran bidang pendidikan sebesar Rp. 7.115.768.680.821. Dalam 3 tahun terakhir rata-rata pengeluaran bidang pendidikan pada pulau jawa dan pulau sumatera sebesar Rp. 2.3 triliun.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan “rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “APBD adalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan, bahwa alokasi dana untuk pendidikan 20% dari APBD. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1, yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”.

Pendapatan ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah menyebabkan melambatnya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pendidikan. Di sini menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Pemerintah harus mengawasi agar anggaran pendidikan benar-benar sudah disalurkan secara merata.

**Tabel 1.4****Anggaran Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Provinsi  
Tahun 2016-2019 (Rupiah)**

<b>Provinsi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dki Jakarta	1,417,923	1,492,889	1,636,358
Jawa Barat	453,753	644,322	627,984
Jawa Tengah	471,741	572,524	608,411
Di Yogyakarta	118,650	133,237	135,292
Jawa Timur	481,773	535,345	705,583
Banten	121,917	188,814	215,665
Aceh	272,338	302,805	306,190
Sumatera Utara	227,760	276,668	330,992
Sumatera Barat	189,847	212,466	215,280
Riau	237,797	205,703	212,800
Jambi	69,427	93,447	114,232
Sumatera Selatan	142,275	116,180	178,430
Bengkulu	46,579	68,570	70,544
Lampung	111,771	152,361	156,117
Kep. Bangka Belitung	45,047	47,532	53,464
Kep. Riau	58,401	62,374	98,302

*Sumber: Kemdikbud Anggaran Daerah Pendidikan Tahun 2017-2019*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terdapat 5 provinsi dengan anggaran pendidikan dari APBD tertinggi selama tahun 2017-2019 posisi pertama yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran pendidikan sebesar Rp. 1,636,358 triliun. Selanjutnya, posisi kedua yaitu provinsi Jawa Timur dengan anggaran pendidikan dari APBD sebesar Rp. 705,583 miliar. Kemudian posisi ketiga yaitu provinsi Jawa Barat dengan anggaran pendidikan dari APBD sebesar Rp. 627,984 miliar. Lalu pada posisi keempat yaitu provinsi Jawa Tengah dengan anggaran pendidikan dari APBD sebesar Rp. 608,411 miliar. Terakhir

posisi kelima yaitu provinsi Sumatera Utara dengan anggaran pendidikan dari APBD sebesar Rp. 330,992 miliar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang mana tingkat partisipasi perguruan tinggi pada Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera relative tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sejauh ini penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi pada kelompok umur 19-23 tahun di Indonesia masih relative sedikit. Selain itu di dalam penelitian ini dilihat bagaimana pengaruh variabel Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB perkapita) dan Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan. Serta seberapa besar pengaruhnya terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi pada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2010-2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan

Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera?

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB perkapita, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB perkapita, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Anggaran Daerah Bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB perkapita, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan Pendidikan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan angka

partisipasi perguruan tinggi serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, terkait dengan analisis pengaruh Jumlah Perguruan Tinggi, Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB perkapita), Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.